

Policy Brief

Kebijakan Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat

By: Jayanti Armida Sari, dkk.

Ringkasan Eksekutif

Kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan, masih menjadi masalah serius. Di Nagari Lingkuang Aua, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 14.181 jiwa pada tahun 2022. Program Dana Desa terbukti berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan & kesehatan, bantuan langsung tunai (BLT), serta program pemberdayaan seperti ketahanan pangan dan pelatihan keterampilan.

Namun, dampak program masih bersifat jangka pendek, terutama sekadar memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pendidikan, kesehatan) dan belum menyentuh akar struktural penyebab kemiskinan. Kesenjangan distribusi, kapasitas aparatur nagari, serta minimnya program pemberdayaan ekonomi jangka panjang menjadi faktor pembatas efektivitas program.

Solusi yang ditawarkan mencakup:

1. perbaikan mekanisme targeting penerima manfaat;
2. penguatan program pemberdayaan ekonomi;
3. peningkatan partisipasi masyarakat;
4. monitoring dan evaluasi berkala berbasis data;
5. penataan ulang prioritas alokasi Dana Desa sesuai kebutuhan lokal.

Pemangku kepentingan utama: Pemerintah Nagari, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Kementerian Desa, BUMNag, kelompok masyarakat, dan kader pemberdayaan lokal.

Pendahuluan

Kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia cenderung lebih tinggi dibanding perkotaan. Nagari Lingkuang Aua termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, mencapai 14.181 jiwa atau tersebar di 11 jorong dengan persebaran tidak merata—Simpang Empat menjadi yang tertinggi (3.424 jiwa).

Dana Desa hadir sebagai instrumen strategis pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2014 dan PP No. 60/2014. Penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa di Lingkuang Aua telah dialokasikan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan penanganan kondisi darurat.

Urgensi topik ini terletak pada perlunya peningkatan efektivitas Dana Desa agar tidak hanya mengurangi kemiskinan secara sementara, tetapi juga mendorong transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Deskripsi Masalah

1. Ketidaktepatan Sasaran dan Ketimpangan Distribusi

Temuan awal menunjukkan bahwa sebagian Dana Desa tidak tepat sasaran, sehingga kelompok yang paling membutuhkan tidak selalu memperoleh manfaat. Perbedaan jumlah jorong juga menyebabkan ketimpangan distribusi alokasi dana per wilayah.

2. Dampak Program Masih Jangka Pendek

Bantuan tunai dan program dasar memang membantu pemenuhan kebutuhan harian, namun tidak menyentuh akar struktural kemiskinan seperti ketidakstabilan pendapatan, terbatasnya keterampilan, dan akses ekonomi yang lemah.

3. Kualitas Perencanaan dan Kapasitas Aparatur yang Terbatas

Penelitian mencatat adanya keterbatasan pemahaman regulasi, lemahnya sinergi data, minimnya transparansi laporan penggunaan dana, partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam musyawarah nagari. Hal ini menyebabkan program yang berjalan kurang responsive terhadap kebutuhan lapangan.

4. Program Pemberdayaan Belum Optimal

Meski terdapat program ketahanan pangan (budidaya ikan), pelatihan barista & kuliner, dan BUMNag, namun dampaknya belum merata, skala program kecil, keberlanjutan pasca-program belum terjamin. Sebagian program belum mampu menghasilkan peningkatan pendapatan secara signifikan.

5. Tingginya Angka Kemiskinan Ekstrem

Data 2022 menunjukkan distribusi kemiskinan ekstrem tidak merata di berbagai wilayah:

- Tertinggi: Simpang Empat (3.424 jiwa)
- Terendah: Rimbo Janduang (485 jiwa)

Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan berbasis spasial dan kebutuhan khusus tiap jorong.

Rekomendasi

1. Memperbaiki Mekanisme Penargetan Penerima Manfaat (Targeting)

- Menggunakan data terpadu desa hasil verifikasi lapangan.
- Melibatkan unsur jorong dan kader sosial.
- Membangun sistem aduan masyarakat (*complaint handling mechanism*).

2. Memperkuat Program Pemberdayaan Ekonomi yang Berkelanjutan

- Mengembangkan klaster ekonomi per jorong (misal perikanan, kuliner, UMKM).
- Menyediakan pelatihan lanjutan, pendampingan mentor, dan akses permodalan BUMNag.
- Mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan

- Memperkuat musyawarah nagari (Musna) agar lebih inklusif.
- Membuka akses publik terhadap dokumen perencanaan dan laporan keuangan.
- Mengaktifkan forum pemuda dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa melalui Prioritas yang Tepat

- Menata ulang komposisi anggaran (pembangunan vs pemberdayaan vs respons darurat).
- Mengutamakan kegiatan berorientasi dampak jangka panjang seperti peningkatan keterampilan, pengembangan ekonomi produktif, dan infrastruktur pendukung usaha.
- Dana Desa yang disalurkan kepada BUMNag *bukan* dalam bentuk uang tunai (cash), tetapi dalam bentuk *aset desa* yang kemudian dikelola untuk kegiatan ekonomi

5. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

- Membuat *dashboard* evaluasi real-time Dana Desa.
- Melaksanakan evaluasi triwulan bersama aparat nagari dan masyarakat.

Referensi

Peraturan Nagari Lingkuang Aua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023

Sari, J. A., Sunarya, A., & Darmanto. (2025). *The Role of the Village Fund Program in Alleviating Poverty in Rural Areas*. Dirasat: Human and Social Sciences, 52(3), 7096.